AS SIYASAH
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E ISSN: 2549-1865

Vol. 11 No. 1 Bulan Mei Tahun 2026
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/index
Jurnalfisipuniska@gmail.com

PERAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DALAM MENDUKUNG MINAT RISET PUBLIK DI KABUPATEN SUMENEP

Alfarisi[1)*], Nur Inna Alfiyah[2)]

[1)* 2)]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja, Indonesia
Email: alfa.afrs28@gmail.com, nurinna@wiraraja.ac.id
*Corresponding Author**

DOI : 10.31602/as.v11i1.22878
Riwayat Artikel :
Diterima : 26 – Februari – 2026
Disetujui : 27 – Mei – 2026
Diterbitkan : 30 – Mei – 2026
Hal : 47 – 61

Abstract

This study aims to determine the role of the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) of Sumenep Regency in supporting public research interest, as well as its impact on improving the quality and quantity of research in the region. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. Informants consisted of BRIDA representatives, academics, and other research practitioners. The research focus refers to the five main roles of the local government: regulator, dynamic agent, facilitator, innovator, and catalyst. The results show that BRIDA has played a strategic role in building a research ecosystem in Sumenep Regency through policy formulation, training, collaboration with universities, and facilitation of research and innovation based on local needs. BRIDA also encourages the active participation of civil servants, lecturers, students, and the community in research activities. However, challenges remain, particularly in efforts to acculturate a research culture to the non-academic community and in terms of budget and resource limitations. This study concludes that BRIDA is less than optimal in contributing significantly to generating public research interest and strengthening regional research governance. This role is crucial in supporting evidence-based policy and increasing regional competitiveness through relevant and sustainable innovation.

Keywords: *BRIDA, public research, regional innovation, government role, Sumenep Regency.*

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright ***© 2026 by Journal As Siyasah***

PENDAHULUAN

Kondisi minat riset dan inovasi di Kabupaten Sumenep dari dari tahun ke tahun dapat digambarkan dalam bebera aspek. Diantaranya adalah kebijakan daerah, peran BRIDA, Partisipasi masyarakat dan akademisi, serta peluang dan tantangannya. Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 sampai 2023 pasca pandemi Covid-19 sedang menghadapi pemulihan. Sebagaimana (Mukhlishah, 2023) mengatakan bahwa "Pemulihan dalam wilayah riset akhirnya harus terfokus pada pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan UMKM". Pemulihan yang dimaksud adalah fokus riset yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Pendidik atau Dosen, dan Mahasiswa pada sektor-sektor itu, ditambah dengan kebijakan terkait Inovasi Daerah yang turut memberikan rangsangan. Maka dengan itu, proses transisi dan adaptasi dari pra Covid-19 sampai pasca Covid-19 mulai dirasakan sehingga pemerintah mulai merencanakan dan menyusun struktur kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai ganti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA).

BRIDA mulai melakukan sosialisai akan pentingnya riset dan inovasi untuk meningkatkan kapasitasnya, serta mendukung tugas Pemerintah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kebijakan publik. Pada tahun 2024 BRIDA telah resmi dibentuk dan sudah berlaku mulai dari bulan Januari 2024 (Mahdi, 2024), dan mulai melakukan kolaborasi dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumenep seperti Universitas Wiraraja, Universitas Annuqayah, Universitas Bahaudin Mudhary, STITA Usymuni, dan Universitas Al-Amien. Dan dengan langkah kolaborasi itu, peningkatan riset dan inovasi mulai

dirasakan, BRIDA mulai melakukan penjaringan untuk berkontribusi pada kebijakan dengan berharap kebijakan bisa berbasis pada data atau *evidence-based policy*. Sebagaimana dijelaskan dalam (Madura, 2024) bahwa "Keberlangsungan Riset di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan dengan langkah kolaborasi dan penerapan inovasi". BRIDA juga mengerahkan Pelaku Riset pada masalah-masalah spesifik di Kabupaten Sumenep seperti Pertanian, Parawisata Pemberdayaan Desa, Stunting, dan Ekonomi Kreatif. Hingga saat ini (2025), BRIDA Kabupaten Sumenep masih dalam mengupayakan integrasi dan arah strategis lembaga BRIDA.

Keberadaan BRIDA di Kabupaten Sumenep membawa harapan besar masyarakat atas hadirnya wadah yang berfokus pada Riset dan Inovasi untuk Daerah, khususnya agar masalah-masalah daerah dapat diselesaikan tanpa menunggu Intruksi dan kebijakan yang belum entu tepat keputusannya, meskipun dengan itu BRIDA Kabupaten Sumenep tetap berada dibawah Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagaimana terbentuknya BRIDA yang tercantum dalam Pembentukan BRIN didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Peraturan Presiden, 2021). Seiring dengan pembentukan BRIN, UU Nomor 11 Tahun 2020 juga mengatur pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), yang merupakan perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Keberadaan BRIN dan BRIDA juga merupakan manifestasi dari Otonomi daerah Undang – Undang nomor 23 tahun 2014. Transisi ini sudah berlansung lama hingga tahun sekarang kebijakan ini tetap berlaku, untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah agar mengurus, mengoptimalkan, dan mengelola rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan, dan membangun masyarakat (Guntoro, 2021). (Julianto and Prasojo, 2020) Juga Menegaskan bahwa "Adanya Implementasi Otonomi Daerah, artinya daerah yang dimaksud memiliki hak dan kewenangan untuk membangun daerahnya sendiri dengan tetap berlandaskan pada kepentingan masyarakat dan potensi yang dimiliki".

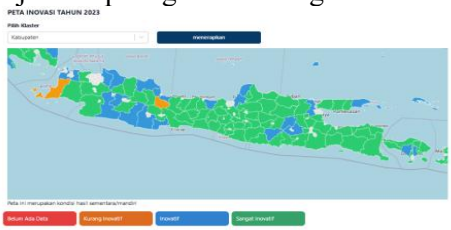
Riset sendiri dipahami sebagai proses sitematis yang bertujuan mendapatkan pengetahuan baru atau pembaharuan pengetahuan dengan mengumpulkan data, melakukan analisis, menginterpretasi, dan membahas hasil agar mendapatkan kesimpulan yang lebih baik terkait suatu hal. Sementara Inovasi merupakan suatu gagasan yang baru untuk diterapkan guna memperbaiki proses atau jasa (Robbins, 1994). Hopkins & Honer, 2004 dalam (Hidayat, 2024) bahwa "Riset yaitu mengirimkan pertanyaan atau isu dan menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah". Dengan penjelasan itu, riset dan inovasi ialah proses yang terhubung untuk mengetahui dan menciptakan suatu pengetahuan yang mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dengan menyelesaikan masalah yang ada, membangun dan memberikan sumbangsi. Karena penelitian dapat berperan dalam memberikan sudut pandang baru bagi pemerintah dalam menghasilkan solusi inovatif untuk pembangunan daerah.

Langkah strategis pembangunan berbasis riset dan inovasi di Sumenep memerlukan kerjasama erat antara pemerintah dengan perguruan tinggi yang pasti banyak melakukan penelitian. Kaitan pemerintah dan perguruan tinggi harusnya menyiratkan suatu perubahan yang berkemajuan dengan terhubung secara linier dalam memproduksi pengetahuan dan kebijakan berbasis bukti. Menjawab kebutuhan interaksi antara perguruan tinggi dan pemerintah diartikan sebagai konsep kerjasama sebagai satu upaya perbaikan melalui berbagai kegiatan yang mendorong inovasi. Sebagaimana (Firdaus, 2022) mengungkapkan bahwa "Aktivitas riset adalah kegiatan kolaborasi", artinya membutuhkan kontribusi dari elemen lain yang mendukung terbentuknya rangkaian kegiatan yang sistematis, berkaitan dan saling kebergantungan sehingga tercipta ekosistem.

Ekosistem riset bisa dipahami sebagai hasil juga syarat untuk menghasilkan riset yang bermutu dan

menggerakkan lahirnya inovasi serta transformasi kebijakan melalui elemen-elemen. Elemen itu seperti kebijakan atau regulasi, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Kelembagaan artinya melandasi bingkai atau desain organisasi, prosedur, peraturan, perintah, budaya/etika/norma pada organisasi yang mengemban mandat riset dan inovasi daerah. Dan tentunya juga Sumber Daya meliputi seorang ahli atau kepakaran, kompetensi atau keterampilan, pemanfaatan data dan informasi, sarana dan prasarana. Sebagaimana pernyataan Mark Parker dalam (Maritha, 2021) mengaris bawahi bahwa "*The best innovation comes from inclusive work environments that foster diverse ideas, nurture people with diverse talent and backgrounds, and create strong relationships with diverse communities*". Yang artinya, "Inovasi terbaik datang dari lingkungan kerja inklusif yang menumbuhkan beragam ide, membina orang-orang dengan beragam bakat dan latar belakang, dan menciptakan hubungan yang kuat dengan beragam komunitas".

Di lain sisi, kondisi minat riset dan inovasi di daerah Kabupaten Sumenep masih bisa dikatakan keterbelakangan, hal itu bisa diakibatkan oleh berbagai faktor. Ini diperkuat menurut data sementara terkait inovasi dalam (BSKDN, 2024) menunjukkan peta/gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Peta Inovasi
(Sumber : BSKDN, 19 Desember 2019)

Gambar diatas menunjukkan Kondisi Inovasi di Kabupaten Sumenep, bahwa Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten yang Inovatif tetapi masih belum naik level pada kategori "Sangat inovatif", berbeda dengan Kabupaten lain yang ada di Madura (Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan) yang menduduki Kabupaten yang "Sangat Inovatif". Artinya, Kabupaten Sumenep perhari ini masih menjadi daerah yang terbelakang di Pulau Madura. Ini merupakan masalah yang seharusnya di respon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar bisa berdaya saing dengan Kabupaten lainnya yang ada di Madura. Oleh karena itu, Kajian tentang sejauh mana Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat berperan dalam mendukung minat riset Publik di Kabupaten Sumenep sangat penting untuk dibahas dan diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian "Optimalisasi Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya" oleh (Hidayat, 2024), dan penelitian "Studi Kajian Program Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan" oleh (Fasya *et al.*, 2024), serta penelitian "Potensi Berkembangnya Inovasi Pembangunan Daerah Berdasarkan Aktivitas Penelitian Perguruan Tinggi Di Kabupaten Pringsewu" oleh (Hutama, 2022). Kemudian penelitian "Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo" oleh (Syamsuddin and Fuady, 2020).

Konsep peran Menurut (Soekanto, 1982), peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannyam, maka ia menjalankan suatu peran. Kemudian peran pemerintah maksudnya adalah lembaga atau institusi publik yang memiliki kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya dalam mencapai tujuan negara. Dan Menurut (Syaukani et al., 2002) mengemukakan bahwa yang dimaksud Peran pemerintah antara lain : Fasilitator, artinya adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dalam pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pendanaan atau pemberian modal. Kemudian Regulator, artinya adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah bergerak dengan memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen basis pelaksanaan kegiatan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kategori informan kunci, utama, dan pendukung. Informan kunci adalah Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah, informan utama adalah Koordinator Program Bidang Riset dan Inovasi di BRIDA, sedangkan informan pendukung terdiri dari pegawai BRIDA yang mengelola program riset dan inovasi serta peneliti atau akademisi. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang peran Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam mendukung minat riset publik di Kabupaten Sumenep.

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013) terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga data jenuh. Tahapan tersebut meliputi : Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diikuti reduksi data untuk memilih dan menyederhanakan data yang relevan. Kemudian, data disajikan dalam bentuk naratif, matriks, diagram, tabel, atau bagan. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan interpretasi data secara terus-menerus hingga menemukan makna dan intisari dari data yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BRIDA Kabupaten Sumenep berfungsi sebagai bagian dari BAPPEDA untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, 2023), BRIDA dirancang untuk terintegrasi dengan perangkat daerah. Tujuan integrasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas riset dan inovasi di daerah, sehingga BRIDA diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan berbasis riset dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan pembangunan berbasis riset dan inovasi telah terbukti efektif di berbagai daerah maju, meningkatkan inovasi secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen kuat dan strategi efektif dari pemerintah dalam mendukung implementasi strategi inovatif. Pembangunan daerah yang efektif dan efisien memerlukan landasan hasil riset yang kuat. Riset dapat memperkuat kebijakan daerah dengan menyesuaikan situasi dan kondisi lokal. Sistem inovasi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan kreatif, sehingga mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat dan berbagai pihak (Puspitasari, 2021).

Sejalan dengan Pendekatan Sistem Inovasi dalam Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025, yang menyatakan tentang pencapaian Visi Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing dilakukan dengan penguatan Sistem Inovasi dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (Sulaeman, 2021). Kemudian, dalam upaya pencapaian target dengan basis pengetahuan dalam berdaerah yang baik melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2021 Pasal 34, tentang tugas BRIDA yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan invensi dan inovasi di daerah. Kurang lengkap rasanya bila tidak dilanjutkan dengan menyeluruh dan keberlanjutan, melaksanakan penyusunan rencana yang terarah dan memiliki peta jalan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi di daerah Kabupaten Sumenep sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan daerah yang inovatif memerlukan korelasi yang kuat antara riset, inovasi, dan pembangunan. Pemerintah daerah perlu melibatkan elemen lain, seperti perguruan tinggi, untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Inovasi yang inklusif dan berbasis riset dapat tercapai jika sistemnya tidak eksklusif dan memungkinkan partisipasi dari berbagai pihak. Namun, perilaku patron-client yang menganggap kelompok lain tidak selevel dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kebijakan inovasi yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem yang terbuka dan memungkinkan aksesibilitas

yang luas dalam mengadopsi inovasi kebijakan.

Dilain sisi, Ternyata Indonesia secara mayoritas membuat kebijakan belum berangkat dari hasil riset ini dipertegas dalam (Asmara, 2019) mengemukakan bahwa dalam menciptakan berbagai kebijakan, pemimpin di Indonesia lebih banyak mempreferensikan hasil pertimbangan semata dalam artian tidak mengandalkan hasil penelitian (Riset), akibat dari pengambilan kebijakan yang tidak berbasis pada riset (science-based policy) melahirkan kebijakan yang tidak menyentuh kesejahteraan rakyat. Kertati dalam (Syamsul Alam, Faturachman Al Putra and La Ode Mustafa R, 2023) juga memperkuat bahwa proses inovasi pelayanan publik di daerah seringkali tidak sistematis dalam memperluas inovasi daerah masih diperlukan.

Permasalahan yang terkait dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep dengan mengkorelasikan hasil observasi dan wawancara dengan teori-teori yang relevan. Sebagaimana fokus utama penelitian ini adalah teori peran yang dikemukakan oleh Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwidjowijoto, yang menyebutkan 5 prinsip peran. Prinsip-prinsip ini akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep dalam mendukung minat riset publik.

Regulator

BRIDA Kabupaten Sumenep memiliki peran sebagai regulator dalam menetapkan aturan dan kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat di sektor tertentu. Sebagai regulator, BRIDA bertugas menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menggunakan peraturan-peraturan. BRIDA seyogyanya memiliki acuan dasar yang jelas untuk mengatur kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dan melindungi kepentingan publik.

Selaras dengan pendapat yang di kemukakan oleh (Saufiah *et al.*, 2024) Pemerintah tentunya mempunyai peranan sebagai pengambil kebijakan (regulator), yaitu membuat kebijakan, meningkatkan produktifitas, dan mengatasi masalah. Menetapkan arah dengan memberikan peraturan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, mendorong dinamisme, yaitu. mendorong partisipasi masyarakat, sehingga tidak timbul kendala dalam proses pembangunan. Dan memelihara dinamika pembangunan daerah dan sebagai pemrakarsa yaitu kondisi yang menguntungkan bagi terselenggaranya pembangunan yang melayani berbagai kepentingan masyarakat. Sebagai regulator, regulasi BRIDA berhubungan erat dengan konsep kebijakan publik, kerana pada perangkat pemerintah kebijakan publik merupakan sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Thomar R. Dye bahwasannya pemerintah itu memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik disadari atau tidak, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang dinamakan sebagai kebijakan publik dalam (Nurrahman, 2020).

Namun, Seperti pendapat (Abdal, 2015) bahwa Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal. Dalam hal ini, kebijakan dalam ruang linkup BRIDA adalah untuk berperan dalam meningkatkan produktivitas dan mengatasi masalah dengan menetapkan arah pembangunan aktivitas dan ekosistem riset melalui peraturan yang seimbang seperti halnya prosedur dan panduan. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mencegah kendala dalam proses, sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

BRIDA Kabupaten Sumenep berperan dalam meningkatkan minat riset publik melalui regulasi yang dibentuk berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2003 dan Perbup No. 70 Tahun 2023. Sebagai amanat, BRIDA masih dalam tahap formulasi kebijakan untuk mengendalikan kegiatan riset dan inovasi, dan telah memiliki satu kebijakan terkait inovasi. BRIDA juga menghadapi beberapa hambatan dalam memproses kebijakannya, seperti peningkatan kompetensi SDM di BRIDA dan kurangnya sarana, termasuk laboratorium. Kebijakan BRIDA dalam hal

ini berupaya memperkuat program dan kegiatan melalui penelitian dan kolaborasi, dan menentukan tema risetnya untuk menyelesaikan masalah di Kabupaten Sumenep.

Tabel 1 Rekap Kolaborasi Riset

NO	TAHUN	JUMLAH RISET
1	2024	15
2	2025	7

(Sumber : BRIDA Sumenep, 6 Juli 2025)

BRIDA Kabupaten Sumenep memiliki kebijakan yang terbuka bagi perguruan tinggi dan akademisi untuk berkontribusi dalam pengembangan daerah melalui riset dan inovasi. BRIDA melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengusulkan riset dan mendapatkan pendanaan.

Melalui kebijakan mengenai penentuan-penentuan tema riset atau penelitian yang dikompetisikan ketika berkolaborasi dengan sejumlah Perguruan Tinggi. Kompetisi yang dimaksud adalah kolaborasi BRIDA dengan LPPM di setiap Perguruan Tinggi yang menjadi panitia dalam kompetisi riset di BRIDA. Dengan dibukanya kompetisi ini, para peneliti kemudian merasa bahwa diberikan ruang dan kesempatan untuk mengikutsertakan hasil riset/penelitiannya agar dapat berkontribusi kepada masyarakat umum melalui kegiatan ini. Dalam kompetisi itu, terdapat kebijakan pemerataan yang dimana setiap kampus diberikan kouta sejumlah 2 (Dua) dari masing-masing kampus yang lolos.

Perlakuan sama kepada setiap Universitas itu tidak mampu menggambarkan keadilan bagi semua pihak. Sebagaimana ditegaskan menurut (Mulyadi, 2018) bahwa Kebijakan Publik yang adil merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik. Dengan itu, di karenakan pihak peneliti dari setiap Universitas yang tidak menikmati hasil kolaborasi menganggap bahwa BRIDA tidak tranparan dalam Kompetisi Riset. Kebijakan pemerataan itu tidak berdasar dan tidak mencerminkan kaadilan bagi para akademisi ataupun peneliti, dimana harusnya setiap peneliti mendapatkan haknya untuk dapat berpartisipasi sesuai dengan kualitas riset dan relevasnsi riset pada akar masalah atau persoalan di Kabupaten Sumenep. Maka dengan itu, kondisi ini secara garis besar menyimpulkan bahwa BRIDA Kabupaten Sumenep secara formulasi, implementasi dan evaluasi dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan mesalah publik tidak maksimal.

BRIDA juga membentuk panitia di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di masing-masing kampus, namun panitia kompetisi riset di LPPM juga mengikuti kompetisi tersebut. Dengan pembatasan 2 kuota yang dapat lolos ke BRIDA semakin memudarkan harapan para peneliti untuk bisa lolos. Sebagaimana hasil penelitian bahwa, kompetisi yang diselenggerakan rancuh akibat tidak memiliki prosedur, sebagaimana ketentuan umum dan khusus dalam kompetisi harus dibuat dan disosialisasikan. Inilah mengapa Lasswell dalam (Abdal, 2015) mengingatkan tentang pentingnya pendekatan-pendekatan kebijakan dalam memahami problematika masyarakat. Dalam hal ini, BRIDA perlu memahami dan melakukan pendekatan sebelum berkebijakan di aspek kompetisi riset atau penelitian, seperti misalkan aturan khusus dan umum bagi panitia dan peserta, mekanisme dan sistematika, pendampingan.

Dilain sisi, Sebagaimana dejalaskan tadi bahwa proses penilaian proposal atau karya ilmiah dianggap tidak objektif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Peneliti merekomendasikan konsep *Blind Review* sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga BRIDA. Karena dengan *Blind Review*, Proses kompetisi Riset yang diselenggarakan oleh BRIDA dapat informatif dan objektif sesuai dengan permasalahan proses penilaiain yang terlalu politis. konsep *review* yaitu *Blind Review* seperti yang dilakukan di berbagai daerah lainnya dan membuka kompetisi riset secara bebas dan umum untuk membuka akases kepada masyarakat khalayak serta

melahirkan mewujudkan kebijakan yang inklusif.

Konsep tinjauan ada beberapa mekanisme seperti *Singgle blind-Review*, *double-blind*, *Perr-review*. Meskipun demikian, sebagaimana permasalahan tersebut, konsep yang cukup bisa memecahkan masalah adalah *Double-blind Review,* dimana identitas penulis dan peninjau tidak diketahui satu sama lain. Jenis tinjauan sejawat ini menghilangkan kemungkinan bias berdasarkan jenis kelamin, etnis, kebangsaan, institusi, atau prestasi penulis sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Chartier, 2022) bahwa peninjauan *double-blind*, informasi identitas penulis harus dihapus dari karya sebelum diserahkan kepada peninjau. Peninjau menilai karya tanpa mengetahui di mana penelitian dilakukan dan siapa yang menyusun laporannya. Penelitian tersebut dievaluasi dan diserahkan kembali kepada penyelenggara konferensi yang akan melampirkan kembali karya tersebut pada informasi identitas penulis, dan memberikan umpan balik kepada penulis tersebut.

Regulator merupakan indikator penting dalam mengukur peran BRIDA dalam mendukung minat riset publik di Kabupaten Sumenep. BRIDA telah melaksanakan tugasnya sebagai intansi yang bergerak di bidang riset dan inovasi sesuai dengan PERDA dan PERBUP. Namun BRIDA sendiri masih belum memiliki kebijakan sendiri untuk mengatur ekosistem dan layanan yang spesefik mengenai riset dan inovasi, tetapi sudah dalam proses formulasi. Bahkan ada beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti kepada BRIDA untuk melakukan evaluasi baik secara regulasi yang menyangkut reviewer, objektifitas penilaian proposal, dan malukakan kompetisi riset secara terbuka serta ada transparansi menganai kompetisi. Dengan itu, dapat disumpulkan bahwa BRIDA Kabupaten Sumenep dalam Indikator Regulator dapat dikatakan belum maksimal dalam mendukung minat riset publik.

Dinamisator

Dalam konteks ini, dinamisator merupakan prinsip yang menjadi instrumen fundamental sebagai rangsangan atau stimulus partisipasi masyaraat atau pihak yang memiliki keperluan pada BRIDA, terutama apabila terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Peran yag dimaksud seperti mengarahkan, memberikan bimbingan secara intensif dan efektif kepada pihak yang memiliki keperluan terutama masyarakat seperti tim penyuluh atau bentuk pelatihan seperti menurut Rosmaladewi (2018:75-81) dalam (Saufiah *et al.*, 2024) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai dinamisator salah satunya adalah meningkatkan kompetensi, meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif, dan agen mempercepat perubahan. Mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era disrupsi digital dan meluasnya informasi, BRIDA diharuskan dapat secara dinamis memeberi layanan yang terbaharukan dan menyesuaikan oleh tren, kultur, dan ide-ide baru yang tidak pasti kedepan agar BRIDA tetap eksis dan adaptif.

Teece (2007) dalam (Darusman, 2020) Kemampuan dinamis dapat dipisahkan ke dalam kapasitas (a) untuk merasakan dan membentuk peluang dan ancaman, (b) untuk merebut peluang, (c) untuk mempertahankan daya saing melalui peningkatan, penggabungan, perlindungan, dan, jika perlu, mengkonfigurasi ulang aset-aset baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam perspektif teori pemerintah dinamis Menurut Neo & Chen, bahwa tata kelola yang diterapkan pada *dynamic governance* adalah kunci keberhasilan, terutama di dunia dimana perkembangan teknologi dan globalisasi semakin cepat. Dinamisme ini ditandai ide-ide baru, asumsi baru, perbaikan terus menerus, pengambilan keputusan yang sangat cepat, adaptasi yang sangat dinamis dan fleksibel, serta inovasi yang kreatif dan solutif (Sari and Rusli, 2023).

Tata kelola dan dinamisasi dalam hal ini BRIDA menjembatani interkasi peneliti dengan masyarakat dengan bentuk kontribusi riset pada kehidupan masyarakat, diawali degan penentuan topik atau tema dari hasil identifikasi BRIDA mengenai promblem yang ada ditengah-tengah masyarakat. BRIDA melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu memberikan kesadaran pentingnya riset. Tidak hanya itu,

umpan sekaligus program yang diberikan BRIDA bisa dikatakan cukup menarik kerena BRIDA menggunakan program kompetisi dan hasil kompetisi yaitu riset yang berbasis pada isu daerah yang relevan dan mendesak serta isu yang berbasis pada potensi daerah Kabupaten Sumenep sebagai nilai tawar yang dipamerkan di forum-forum terbuka seperti FGD dan Podcast Desiminasi yang dilakukan oleh BRIDA, dan juga dalam digital yaitu website dan media sosial yang dimiliki oleh BRIDA seperti Instagram. Oleh karena ini BRIDA sebagaimana konsep tata kelola pemerintah yang dinamis yang menekankan pada kemampuan adaptasi, responsivitas, dan efisien cukup terampil dan kreatif dalam memposisikan diri dan membangun dinamika riset di Kabupaten Sumenep meskipun belum mampu menjangkau masyarakat secara luas. Dalambeberapa aspek masih memerlukan evaluasi seperti program riset yang hanya dilakukan sekali dalam setahun dan menurunnya riset kolaborasi dari 2024 yang berjumlah 15 ke tahun 2025 berjumlah 7 riset saja, dan program kompetisi yang kurang maksimal, karena keberlanjutan kolaborasi riset yang tidak sampai pada tahap implementasi dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat seperti yang dikeluhkan oleh informan atau peneliti, serta sosialisasi dan edukasi yang tidak masif.

Pemerintah dinamis ini tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan hasil yang diperoleh dari kepemimpinan yang mampu menyesuaikan interaksi dengan struktur sosial untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang pada intinya adalah proses yang melahirkan peningkatan kapasitas organisasi atau institusi dengan nilai budaya yang mendukung kapasitas organisasi yang proaktif dan adaptif. Seperti halnya BRIDA yang mengikuti perkembangan teknologi, melahirkan layanan berbasis digital, dengan ide-idenya mengenai topik riset dan inovasi, seperti kegiatan desiminasi dalam bentuk podcasht, dan evalusi terus menerus untuk perbaikan.

Berdasarkan asas dinamisator yang dikorelasikan dengan hasil, BRIDA berperan sebagai penggerak dan fasilitator dalam meningkatkan kesadaran riset dan pembangunan daerah. BRIDA telah menunjukkan keseriusan dalam memfasilitasi interaksi antara BRIDA, peneliti dan masyarakat, sehingga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dan adaptif. Selain itu, BRIDA juga berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan merancang solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dengan dukungan yang signifikan bagi peneliti, BRIDA dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui hasil, BRIDA dalam konteks ini berperan dalam memotivasi masyarakat (peneliti, akademisi dll.) dengan menjadikan kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh BRIDA sebagai intrumen yang memainkan peranan penting dalam membentuk peluang, memberi kesempatan kepada peneliti atau inovator sebagai hak agar memperebutkan peluang, serta mempertahankan daya saing yang sehat dengan adanya rangsangan yang berbentuk fisik ataupun non-fisik seperti peningkatan, pengembangan, perlindungan, penerapan, hibah, dan kolaborasi. Namun, Dalam jangka waktu 2 tahun BRIDA berdiri sampai saat ini, masih dikatakan minim partisipasi masyarakat. Artinya, itu menunjukkan bahwa BRIDA kurang maksimal berperan sebagai dinamisator.

Fasilitator

Sebagai fasilitator, BRIDA harus berupaya menyediakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk menyediakan pengetahuan keilmuan di bidang riset dan inovasi, memfsailitasi komunikasi dan kerjasama, menyediakan informasi dan akses yang baik sebagai dukungan. Diperkuat Menurut (Saufiah *et al.*, 2024) bahwa Peran pemerintah sebagai fasilitator dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menunjang program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, serta memberikan keterampilan teknis yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya.

Menurut Parasuraman (1985), dalam (Chandra, Chandra and Hafni, 2020) bahwa fasilitas adalah salah satu dimensi kualitas layanan yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, seperti infrastruktur, peralatan, dan layanan. BRIDA dalam hal

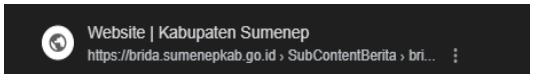
ini sebagai fasilitator adalah sebagai penyedia sumber daya atau segala sesuatu yang disediakan atau disiapkan untuk mendukung minat riset publik, seperti misalkan sumber daya fisik yang meliputi gedung, laboratorium, dan peralatan yang itu relevan dengan kebutuhan riset dan inovasi. Kemudian sumber daya non-fisik seperti sistem informasi dan komunikasi, website dll. Dan terakhir fasiltas dalam bentuk pengembangan kapasitas, seperti pelatihan, workashop dan pendampingan.

Selaras dengan itu, Secara kesediaan fasilitas utuk mendukung minat riset publik, BRIDA dalam hal ini secara tegas mengaku memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi di daerah seperti ; Kerjasama dan Koordinasi, Kompetisi Riset, 100% Pendanaan Riset (Tabel 1), Pendampingan Masyarakat untuk Lomba Inovasi Provinsi atau Nasional, Bimbingan Teknis, Anugerah Inovasi, Website, Jurnal Keraton. Dari beberapa fasilitas yang tersedia tersebut dapat diakses oleh peneliti dengan beberapa syarat dan ketentuan masing-masingnya. Selanjutnya lomba inovasi yang di kompetisikan sebagai fasilitas, dan berikut adalah dokumentasinya :



Gambar 2 Anugerah Inovasi Tahun 2024
(Sumber : BRIDA, 28 Juli 2025)

Selanjutnya adalah Website yang disediakan untuk digitalisasi sistem kompetisi dan layanan BRIDA :



Gambar 3 Website BRIDA
(Sumber : BRIDA Sumenep, 6 Juli 2025)

Kemudian berikut adalah jurnal KARATON yang dikelola oleh BRIDA :



Gambar 4 Jurnal KARATON
(Sumber : BRIDA Sumenep, 7 Juli 2025)

Berikutnya adalah data inovasi yang diikutsertakan di lomba INOTEK :

Tabel 2 Daftar Inovasi Sumenep Di Lomba Inotek Tahun 2024

NO	TEMA INOVASI	INOVATOR
1	"Layak Manis" Layanan Pensiun Duduk Manis	BKPSDM
2	Aplikasi Siap Lahir	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Simpel (Sistem Informasi Manajemen Pengendalian, Evaluasi, Dan Pelaporan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Lakar Beres: L Ayanan Kesehatan Jiwa Remaja Bersama Sekolah	Puskesmas
5	Inovasi Elit Temulawak Eliminasi Tuberculosis Th 2030 Dengan Investigasi Kontak & Minum Temulawak	Puskesmas
6	"Kencan Berdua" (Kelas Bimbingan Calon Pengantin Berkualitas, Terpadu & Aktif)	Puskesmas
7	Sistem Monitoring Prototype Rumah Garam Model Hybrid Berbasis Internet Of Things Pada Perangkat Mobile Untuk Petani Garam (Desa Pinggirpapas, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur)	Masyarakat : ~ Ach. Gozali ~ I mam Junaidi
8	BRIDA Kabupaten Sumenep Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggara Fungsi Kelitbangan Dan Inovasi	Brida Kab. Sumenep

(Sumber : BRIDA Sumenep, 7 Juli 2025)

BRIDA Kabupaten Sumenep melaksanakan kolaborasi Riset yang di kompetisikan dengan masif bersama berbagai Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumenep, OPD, lembaga pendidikan seperti SMA sebagai elemen masyarakat. BRIDA Kabupaeten Sumenep menunjukkan perannya sebagai fasilitator yang baik dalam rentang waktu 2 tahun berdirinya BRIDA meskipun kompetisi riset dan pendanaan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam setahun. Ini selaras dengan pernyataan Osborne dan Gaebler (1992) dalam (Pradana *et al.*, 2024)

yang menegaskan bahwa pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dengan memfasilitasi kerja sama antara berbagai pihak dan mempromosikan inovasi.

Fasilitas yang disediakan BRIDA bisa dikatakan masih belum mampu mendukung Riset secara penuh dan luas. Sebagaimana disampaikan informan sebelumnya bahwa penjaringan dan target BRIDA dalam berkolaborasi masih tergolong kecil dan terbatas, tidak tersedianya laboratorium peta jalan riset Kabupaten, buku-buku pengenalan daerah, digital, Jurnal yang belum Sinta, Anggaran yang terbatas, kurangnya kepakaran dibidang riset dan reviewer, dan belum ada peningkatan kapasitas untuk personel riset diluar pegawai BRIDA itu sendiri. BRIDA juga dituntut agar bisa menjadi pusat riset di Kabupaten, dengan menciptakan ekosistem yang baik, pengkajian, penalaran, dan pengembangan isu kedaerahan yang real objektifdan bersifat urgensif.

Dengan ini, Indikator Fasilitator sangat menjadi penting dalam mengukur bagaimana peranan BRIDA dalam mendukung minat riset publik di Kabupaten Sumenep, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa fasilitas yang disediakan baik fisik dan non-fisik oleh BRIDA bisa dikategorigan belum maksimal atau tidak cukup untuk menunjang perkembangan dan pesatnya minat riset publik di Kabupaten Sumenep, BRIDA dengan keterbatasan fasilitas yang disediakan untuk aktivitas riset publik harus lebih kreatif dan maksimal, memulai dan mengupayakan ketersediaan riset untuk tidak stagnan pada pendanaan, pada lomba dan anugerah, agar Kabupaten Sumenep dengan adanya BRIDA mamapu mendorong dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di segala lini sektor.

Inovator

Dalam menjalankan peran sebagai inovator pemerintah dalam konteks ini adalah BRIDA harus menjadi sumber inovasi. Dalam (Nugroho and Pradana, 2021) Inovasi merupakan salah satu dari hasil dari sebuah kreativitas. Penemuan baru merupakan bagi dari sebuah inovasi seperti temuan baru, metode baru, sistem baru dan juga pola pikir yang baru. Sifat “problem-solving” dan “action-oriented” adalah pendekatan yang di perlukan dalam sistem, prosedur, dan metode kerja.

Dibuktikan dengan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep oleh International Convention Exhibition (ICE) BSD City Tanggerang terkait Smart Society untuk program pencegahan dan kesiapsiagaan atas pelaksanaan penyediaan layanan nomor panggilan darurat Call Center 112 yang di inovasikan oleh RRI Sumenep, berikut adalah dokumentasi atau bukti penyerarahan penghargaan :



Gambar 5 Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep oleh International Convention Exhibition (ICE)
(Sumber : Sumenepkab.go.id, 06 Juli 2025)

BRIDA Kabupaten Sumenep sebagai inovator mendorong inovasi melalui pemberian kesempatan kepada aparatur, pelayanan umum, dan masyarakat. BRIDA menyelenggarakan kompetisi inovasi seperti Anugerah Inovasi dan berpartisipasi dalam penilaian inovasi pemerintah.

BRIDA mengembangkan inovasi berdasarkan hasil penelitian masyarakat, seperti pengembangan sistem informasi manajemen. BRIDA juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas inovasi dan penelitian untuk mencapai target indeks inovasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, BRIDA berupaya menciptakan agenda inovasi melalui lomba-lomba dan kompetisi, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang bermanfaat. Selanjutnya adalah jumlah data Inovasi Daerah Kabupaten sumenep, sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar inovasi

NO	KATEGORI	JUMLAH
1	Inovasi yang terpublish di jurnal KARATON	5
3	Proposal Inovasi di Anugerah Inovasi	46
4	Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep	126
5	Inovasi Kabupaten Sumenep Yang Diikutkan Lomba Inovasi Dan Teknologi (Inotek) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	8

(Sumber : BRIDA Sumenep, 07 Juli 2025)

Dari tabel diatas, Informan Kunci mengatakan tidak ada satupun riset dan inovasi dari BRIDA yang di Adopsi dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sumenep sendiri pada tahun 2025 mendapatkan penghargaan atas gagasan Smart City dengan beberapa inovasi yang dihasilkan juga inovasi yang diikutsertakan di lomba inovasi tingkat Provinsi yang membuahi hasil. BRIDA juga berpartisipasi pada program Kemendagri yaitu *Innovation Government Award (IGA)*.

Namun, dari beberapa data mengenai inovasi di Kabupaten Sumenep yang dikawal oleh BRIDA tidak serta merta melibatkan lembaga BRIDA dalam prosesnya, beberapa diantaranya merupakan Inovasi yang lahir di lembaga lain, BRIDA hanya sekedar klaim untuk menunjukkan eksistensinya di kacah regional atau nasional. Dalam pelaksanaan kerja yang inovatif, pemerintah (BRIDA) harusnya betul-betul serius dan dituntut untuk berfikir kreatif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk melahirkan produk-produk inovasi yang murni lahir dari BRIDA yang akan digunakan untuk pelaksanaan layanan kerja pemerintah. Inovasi seperti E-government misalkan atau inovasi yang belum ada di daerah lain.

Tidak dapat dipungkiri apabila kondisi inovasi Kabupaten Sumenep itu berada dibawah Kabupaten lainnya di Madura, karena BRIDA dengan penyandang nama Badan riset dan inovasi belum betul-betul menjadi laboratorium ide, menjadi lembaga yang produksi konsep yang bisa berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sumenep. Di lain sisi, sebetulnya Inovasi *Podcast* desiminasi dapat mengawal hal-hal lain selain riset untuk memperluas jangkauan BRIDA dalam memproyeksikan nilai pentingnya riset dan inovasi untuk kehidupan publik di daerah.

Kolaborasi juga dapat dikatakan inovasi, selaras pendapat Sabaruddin (2015), dalam (Rozikin, Hesty and Sulikah, 2020) bahwa inovasi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan pendekatan konsep kolaborasi dan e-literacy. Dimana kolaborasi yang dimaksud adalah kerjasama antar aktor, antar organisasi, atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara mandiri/*independent.* Meskipun begitu, apakah hanya dengan Kolaborasi dan Desiminasi dapat dikatakan cukup dan mampu merepresentasikan lembaga pemerintahan yang inovatif, tentunya tidak.

Maka dengan itu, dalam kajian pengambilan kebijakan dan administrasi pemerintahan, inovasi juga sangat penting, karena tanpa hadirnya inovasi, dapat dipastikan bahwa sistem pemerintahan akan kehilangan legitimasinya, tidak ada lagi perintah, artinya tidak ada lagi keseimbangan, pemerintah hanya akan menjadi objek kritik dan narasi kegagalan. Dalam konteks ini, BRIDA Kabupaten Sumenep sudah mampu mengkreasikan ide-ide yang ada menjadi suatu konsep baru walaupun hanya beberapa, dalam hasil wawancara bahkan untuk kegiatan riset saja BRIDA Kabupaten Sumenep Tidak memilliki SDM sebagai subyek peneliti, pertanyaannya adalah apakah inovasi bisa tumbuh tanpa adanya riset? Sepertinya tidak memungkinkan.

Secara teknispun, peneliti juga menyarakan agar BRIDA harus secara konsisten mengawal riset dan Inovasi supaya tidak stagnan pada laporan dan podcast, sebagaimana hasil inovasi dari data Inovasi Kabupaten Sumenep yang di BRIDA sebanyak 185 (pada tabel 3) ini dapat bermanfaat, dari riset dan Inovasi yang dihasilkan dapat secara signifikan dirasakan oleh publik, karena BRIDA bukan hanya lembaga yang peranannya dalam Riset publik sebagai Orkestrator. Dengan itu, BRIDA Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan belum maksimal dalam melakukan peranannya sebagai Inovator.

Katalisator

Katalisator merupakan nilai atau prinsip yang menjadi acuan pemerintah dalam berkebijakan agar dapat berperan dalam mendorong percepatan suatu proses pembangunan yang berbasis potensi daerah. Artinya pemerintah seyogyanya menjadi pendorong dan modal sosial untuk membangun partisipasi, bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai alat perubahan konkret yang memastikan arah yang diinginkan dapat terwujud. Seperti yang dikemukakan oleh (Sumadi and Prathama, 2021) bahwa Katalisator

merupakan seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Peran pemerintah sebagai Katalisator yakni pemerintah dalam hal ini berada diposisi sebagai aktor yang mempercepat pengembangan suatu daerah.

Menurut Osborne dan Gaebler (1992) dalam (Febrianty *et al.*, 2021) katalisator adalah lembaga yang dapat mempercepat proses pembangunan dengan memfasilitasi dan mempromosikan inovasi-inovasi baru. Dalam konteks pembangunan daerah, katalisator dapat berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif. Selaras dengan teori itu, BRIDA menunjukkan peran katalisator yang efektif dalam mendukung pelaksanaan riset publik dan pembangunan daerah. Dengan menjembatani dan memberikan kesempatan kepada semua kampus untuk ikut serta dalam riset, dan memfasilitasi pengembangan potensi daerah dan mempromosikan inovasi-inovasi baru melalui Podcast desiminasi. BRIDA juga telah membantu lembaga lain untuk melihat potensi yang ada dan membuat gebrakan besar di bidang-bidang tertentu, serta memfasilitasi atau mendanai riset dan inovasi yang mendukung perkembangan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep.

Menurut pakar pembangunan daerah, seperti Rondinelli dan Cheema (1983) dalam (Kostynets and Kostynets, 2020) peran katalisator dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) memfasilitasi pengembangan potensi daerah, (2) mempromosikan inovasi-inovasi baru, dan (3) membangun kemitraan dengan stakeholders lainnya. Selaras dengan itu, BRIDA Kabupaten Sumenep melakukan fasilitasi pengembangan potensi daerah dan mempromosikan inovasi-inovasi baru, seperti Program Kompetisi riset dan Anugerah Inovasi yang menghasilkan Inovasi dan Riset yang berbasis pada kebutuhan penyelesaian masalah, juga menyalurkan Inovasi melalui digital. BRIDA melakukan pendampingan baik kepada pegawai BRIDA sendiri, juga bagi masyarakat yang riset dan inovasinya dinilai bagus untuk di kompetisikan di berbagai agenda kompetisi.

Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh BRIDA Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan peran katalisatornya. Menurut informan, BRIDA perlu melakukan review yang transparan dan luas, fokus pada isu-isu prioritas saja di Kabupaten Sumenep, kemudian jangkauan BRIDA yang masih kecil atau tidak memenuhi asas inklusif, dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut setelah melakukan riset. Dengan demikian, BRIDA dapat meningkatkan efektivitas dan manfaat riset bagi masyarakat, serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang tepat. Sebagaimana dalam teori pembangunan daerah, peran katalisator sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut (Dewi and Suryana, 2024) pembangunan daerah yang efektif memerlukan peran katalisator yang kuat untuk memfasilitasi pengembangan potensi daerah dan mempromosikan inovasi-inovasi baru. Dalam hal ini, BRIDA Kabupaten Sumenep dalam peranan katalisator dapat di simpulkan cukup baik dan efektif dalam mendukung pelaksanaan riset dan pembangunan daerah sebagaimana sesuai dengan prinsip katalis.

PENUTUP

BRIDA Kabupaten Sumenep memiliki lima peran utama dalam mendukung minat riset publik, namun masing-masing peran masih memiliki kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan Hasil pemahaman mengenai Peran Badan Riset dan inovasi Daerah dalam Mendukung Minat Riset Publik, yaitu :

1. Sebagai regulator, BRIDA belum sepenuhnya menerapkan prinsip regulasi yang baik karena kurang transparan, tidak akuntabel, dan kurang partisipatif.
2. Sebagai dinamisator, BRIDA cukup adaptif dan inovatif, tetapi kurang maksimal dalam melibatkan masyarakat dan menjaga keberlanjutan program yang dijalankan.
3. Sebagai fasilitator, BRIDA telah memberikan dukungan riset dalam berbagai aspek, tetapi masih terbatas dalam hal anggaran, sarana, keahlian, serta kapasitas sumber daya di luar institusi BRIDA sendiri.
4. Dalam peran sebagai inovator, BRIDA belum mampu menghasilkan inovasi secara

mandiri dan masih bergantung pada pihak lain karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan konsep baru.

5. Untuk peran terakhir sebagai katalisator, BRIDA cukup efektif dalam mendorong sinergi dan pembangunan daerah, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal evaluasi, inklusivitas, serta fokus pada isu-isu strategis.

Secara keseluruhan, BRIDA perlu meningkatkan kapasitas, transparansi, dan inovasi guna memperkuat perannya dalam mendorong riset dan inovasi publik di Kabupaten Sumenep.

Saran

Kritik dan saran ini, peniliti sampaikan untuk kemudian bisa menjadi salah saru acuan baru dalam pengayaan perspektif dari temuan-temuan, bahkan mungkin sebagai nilai yang masih bisa disempurnakan untuk penelitian selanjutnya, kritik dan saran ini peneliti sampaikan untuk ;

BRIDA, sendiri perlu meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi. Selain itu, BRIDA juga perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi melalui program-program yang lebih efektif dan berbasis masyarakat, BRIDA perlu menggunakan konsep Double Blind-review dalam sistem nilai kompetisi, mengakulturasikan ekosistem Riset dan inovasi yang adil, dan keberkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep, perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada BRIDA dalam hal sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi.

Bagi peneliti, yang tertarik dengan topik yang sama, perlu melakukan kajian yang lebih mendalam tentang peran BRIDA dalam mendukung pembangunan daerah. Peneliti juga perlu mengembangkan model-model baru untuk meningkatkan efektivitas BRIDA dalam mendukung kegiatan riset dan inovasi.

REFERENSI

Buku

Mulyadi, D. (2018) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Edited by H.T. Gedeona and M. Nurafandi. Bandung: Alfabeta.

Pradana, P.Y.B.W.F.U.I.W.N.N. *et al.* (2024) *TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK*.

Robbins, S.P. (1994) *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi*. 3rd edn. jakarta: Arcan.

Soekanto, S. (1982) *Sosiologi : suatu pengantar*. jakarta: Rajawali. Available at: https://books.google.co.id/books?id=ynitnQAACAAJ.

Sugiyono (2013) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Guntoro, M. (2021) 'Desentralisasi dan otonomi daerah', *Cendikia Jaya*, 3(2), p. 416. Available at: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwtH9f6GCUUR8zcoYTf1qKpoiTc.

Wrihatnolo, R.R. and Dwijowijoto, R. nugroho (2006) *Manajemen Pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan*. Elex Media Komputindo. Available at: https://books.google.co.id/books?id=coUs3aBV75MC.

Artikel Jurnal

Abdal (2015) *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*, *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Available at: http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf.

Abdussamad, Z. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*, *Sustainability (Switzerland)*. Edited by P. Rapanna. CV. Syakir Media Press. Available at: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Ariadi, A. (2019) 'Perencanaan Pembangunan', *Mereja Journal*, 2(1), pp. 135–147. Available at: https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737.

Asmara, A.Y. (2019) 'Pentingnya riset kebijakan dalam pembuatan kebijakan publik unggul di Indonesia', *journal of Public Sector Innovation*, pp. 37–46.

Chandra, T., Chandra, S. and Hafni, L. (2020) *Service Quality, Consumer Satisfaction, Dan Consumer Loyality : Tinjauan Teoritis*, *international Research and Development for Human Beings*.

Darusman, F. (2020) 'KAPABILITAS DINAMIS SEKTOR PUBLIK : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR', *Jurnal ilmu Adminnistrasi Negara*, 16(1), pp. 1–12.

Dewi, G.A.A. yuliarika. and Suryana, nyoman M. (2024) 'KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PROGRAM INOVASI DESA (Studi Kasus : Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)', *Jomantara: Indonesian Journal of Art and Culture*, 15(Volume 15 No. 02 Juni 2024), pp. 253–262. Available at: https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.13762.

Fasya, N. *et al.* (2024) 'Studi Kajian Program Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan', *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), pp. 343–351.

Febrianty, F. *et al.* (2021) 'Konsep Perkembangan Public Entrepreneurship', *Jurnal Identitas*, 1(1), pp. 20–30. Available at: https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.101.

Firdaus, I. (2022) 'Dukungan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mengakselarasi aktivitas riset energi baru terbarukan di indonesia', *Rechts Vinding*, 11(3), pp. 411–434.

Hidayat, A.F. (2024) 'Optimalisasi Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya', *nurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6).

Hutama, S.T.E.W. (2022) 'POTENSI BERKEMBANGNYA INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN AKTIVITAS PENELITIAN PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN PRINGSEWU', *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 10(02), p. 193. Available at: https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.300.

Julianto, D. and Prasojo, E. (2020) 'Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Mengimplementasikan Inovasi Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah', *Jurnal ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(2), pp. 1–9.

Kostynets, Y. and Kostynets, V. (2020) 'DECENTRALIZATION'S IMPACT ON ECONOMIC GROWTH: A COMPARATIVE ANALYSIS', *Economics, Finance and Management Review*, 4(1), pp. 4–16.

Laia, O., Halawa, O. and Lahagu, P. (2022) 'Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pelayanan Publik', *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), pp. 70–76. Available at: https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.15.

Maritha, D. (2021) 'Kebijakan Inovasi Inklusif Demi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02). Available at: https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.197.

Nugroho, B.E. and Pradana, G.W. (2021) 'Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Progam Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya', *Publika*, 9(3), pp. 155–166. Available at: https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p155-166.

Nurrahman, A. (2020) 'Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi', *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), pp. 1–15. Available at: https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2314.

Puspitasari, M.E. (2021) 'Inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik di kota batam', *Jurnal trias Politika*, 5(1), pp. 1–12.

Rozikin, M., Hesty, W. and Sulikah, S. (2020) 'Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah', *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), pp. 61–80. Available at: https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603.

Sari, A.I. and Rusli, Z. (2023) 'TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS (DYNAMIC GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU', *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).

Saufiah, R. *et al.* (2024) 'Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa tabalong mati kecamatan amuntai utara kabupaten hulu sungai utara', *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3).

Sulaeman, A. (2021) 'Transformasi Sistem Inovasi

Daerah (Sida) Ke Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Brida)', *MAKPI*, 1(5), pp. 1–5.

Sumadi, M.F. and Prathama, A. (2021) 'Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) "Handycraft" Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), p. 2322. Available at: https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2701.

Syamsuddin, R. and Fuady, M.I.N. (2020) 'Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), p. 63. Available at: https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326.

Syamsul Alam, Faturachman Al Putra and La Ode Mustafa R (2023) 'STRATEGI PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INOVASI DAERAH DI SULAWESI TENGGARA', *Journal Publicuho*, 5(4), pp. 1277–1293. Available at: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80.

Sumber Rujukan dari Website

BSKDN (2024) *Peta Inovasi tahun 2023*, *Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri*. Available at: https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/peta-index.

Chartier, M. (2022) *Tinjauan Sejawat Single-Blind vs. Double-Blind - Panduan Sederhana*, *Fourwafes*. Available at: https://fourwaves.com/blog/single-double-blind-peer-review/.

Madura, K. (2024) *Brida Komitmen Melaksanakan Penelitian untuk Pembangunan Sumenep*, *Kabar Madura*. Available at: https://kabarmadura.id/brida-komitmen-melaksanakan-penelitian-untuk-pembangunan-sumenep/.

Mahdi, I. (2024) *Pemkab Sumenep Resmi Tambah Tiga OPD*, *Kabar Madura*. Available at: https://kabarmadura.id/pemkab-sumenep-resmi-tambah-tiga-opd/.

Mukhlishah, W. (2023) *Buah Pemulihan Pasca-pandemi, Angka Kemiskinan Sumenep Turun Drastis*, *Suara Indonesia*. Available at: https://suaraindonesia.co.id/news/news/654373f076790/buah-pemulihan-pascapandemi-angka-kemiskinan--sumenep-turun-drastis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (2023) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah', *JDIH BPK*, pp. 1–13. Available at: www.peraturan.go.id.